



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN FLORES TIMUR**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 telah diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang memuat pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup untuk Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan Program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dan untuk mereview hasil pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Rencana Kerja (Renja) termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dapat terukur dan berorientasi pada hasil yang berujung pada meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Flores Timur.

Larantuka, Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



SERVULUS SATELE DEMOOR, S.Hut

Pembina Tk.I

NIP. 197112172000121002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
PERATURAN BUPATI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
2.3 ISU-ISU STRATEGIS DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN FLORES TIMUR.....	22
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	23
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	34
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	42
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	42
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	44
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
BAB V : PENUTUP.....	54

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	20
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	24
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.....	35
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024.....	43
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	45
Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur	48
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat Program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2024.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. BAB V : Penutup
- (4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2024.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.
- (3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2024 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2024.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 17 Juli 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2024, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

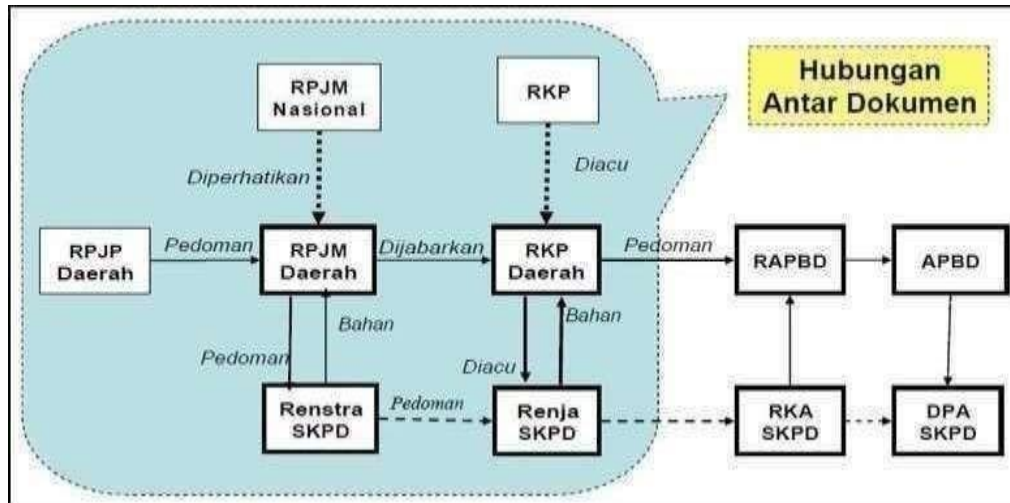
Renja PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Kedua Renstra PD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Renja PD Tahun 2024 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasarkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarkan surat edaran Bupati Flores Timur Tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Renja PD.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur. Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomendasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagaimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Selanjutnya Renja PD Tahun 2024 menjadi acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
14. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
15. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2024 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten

Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja Tahun 2024 merupakan tahun kedua Renstra 2023 s/d 2026 untuk Program Penunjang Kabupaten masih dengan indikator yang sama sedangkan pada Program Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022 capaiannya 42,03%. Dan untuk tahun 2023 s/d 2026 dengan indikator dan target sebanyak 8 progam, sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 Sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2022 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
02-'11	0-0	0-0			DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
x	xx				Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)</i>	100	66	100	126	126			
						<i>Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai (%)</i>	100	53	100	77	77			
						<i>PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (org)</i>	25	7	5	-	-			
						<i>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)</i>	35	27	8	8	100			
x	xx	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja OPD (dokumen)</i>	35	27	8	8	100			
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Tersedianya Laporan Capaian Kinerja OPD (dokumen)</i>	35	27	8	8	100			
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN(kali)</i>		62	26	26	200			
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	<i>Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (kali)</i>	70	14	14	14	100			
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (Bulan)</i>	60	48	12	12	100			
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur (org)</i>	25	7	-	-	-			
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti diklat lingkungan/ lab dan B3 (org)</i>	25	7	-	-	-			

x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)											
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik yang disediakan (komponen)	65	48	6	6	100						
x	xx	01	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	30	13	-	-	-						
						Tersedianya peralatan gedung kantor (jenis)	32	8	-	-	-						
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (jenis)	75	48	14	14	100						
						Jumlah alat tulis kantor, bahan dan kelengkapan komputer (jenis)	80	48	25	25	100						
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (lembar)	420,000	265,178	33,987	33,789	99						
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar majalah yang disediakan (Jenis)	10	8	2	2	100						
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (OK)	5,140	3,586	667	750	112						
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koor-dinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali)	150	100	50	50	100						
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan prasarana yang memadai (%)	100	8	-	-	-						
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair berupa meja kerja1/2 biro dan kursi kerja (uniT)	50	8	-	-	-						
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)											
x	xx	1	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat (kali)	80	48	150	150	100						
x	xx	1	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pelayanan jasa-jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	60	48	12	12	100						
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran Non PNS (orang)	1,205	848	235	235	100						
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%)		97	20	21	533						
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional(unit)	55	28	8	8	100						
						Pemeliharaan kendaraan bermotor, penggantian suku cadang dan belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumnas	40	32	1	1	100						
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terawatnya gedung kantor (gedung) dan perbaikan instalasi listrik (paket)	10	8	2	2	100						

x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara (unit)	30	18	3	4	133			
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		32	11	6	6	100			
2	11				URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	96	59.20	100	100				
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	125	74	2	2	100			
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan berupa TPS (unit)	63	59	-	-	-			
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah sarana kebersihan untuk pengelolaan persampahan (alat kebersihan/paket)	12	10	1	1	100			
						Jumlah truck sampah dan gerobak sampah yang disediakan (unit)	50	5	1	1	100			
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup(Dokumen)	8	6	2	1	50			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		5	4	1	1	100			
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (Informasi Kinerja Pengelolaan LH) (dokumen)	5	4	1	1	100			
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		3	2	1	-	-			
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Kajian Dampak Lingkungan (dokumen)	3	2	1	-	-			
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Persentase Daerah Mata Air yang dikonservasi (%)	50.16	12.70	50,16	0				
						Persentase Rehabilitasi lahan kritis (%)	26.2		26,2	42.62				
						Jumlah Laporan Status Baku Mutu Udara (Laporan)	5	0	1	-				
2	11	03	2.01		Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Terpantaunya kualitas udara (laporan)	5	3	-	-	-			

					Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Lokasi pemantauan kualitas lingkungan (kecamatan)	19	10	10	6	60			
						Jumlah sumber air yang di pantau (titik)	50	33	10	10	100			
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Pengadaan alat-alat dan bahan kimia laboratorium, uji profisiensi (alat/bahan kimia)	50	20	5	5	100			
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase daerah mata air yang dikonservasi (%)	50.16	10.00	5	340				
2	11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah mata air yang dikonservasi (titik mata air)	10	7	5	17	340			
						Luas daerah pantai yang direhabilitasi (lokasi)	5	3	-	-	-			
						Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi/penghijauan (ha)	30	57.80	2	15.38	769			
2	11	04	2.01		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Sona Rehabilitasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah dalam kondisi baik (%)	94							
						Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)	1.70	100		100				
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penyediaan RTH dikawasan Perkotaan (%)								
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terlaksananya penataan Ruang Terbuka Hijau (lokasi)	8	5	2	2	100			
						Terlaksananya pemeliharaan RTH (Lokasi)	16	4						
						Terlaksananya pengembangan tanaman rekreasi	13	-	-	-	-			
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas kawasan terumbu karang yang di kelola	5	1	-	-	-			
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi (dokumen)	5	4	1	1	99.8			
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3									
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah instalasi pengelolaan B3 dan Limbah B3 (unit)	1	-	-	-	-			
						Jumlah instalasi pengelolaan B3 dan Limbah B3 (paket)	2		-		-			
						Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi (dokumen)	5	4	1	1	99.8			
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang memiliki dokumen ijin lingkungan (%)	91	84.24	90.91	42.00	46.20			

2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
2	1	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	jumlah usaha yang memiliki dokumen ijin lingkungan (AMDAL, UKL-UPL dan SPPL) (kegiatan)	920	775	50	21	42					
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penertiban kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) (Kec.)	19	13	6	5	83.3					
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha yang diawasi (usaha)	54	53	13	19	146					
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	<i>Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi (orang)</i>	3500	1170	185	100	54.1					
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah anggota masyarakat yang diedukasi (orang)	3,500	1,170	185	185	100					
2	11	10			Program penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	<i>Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti</i>	68	88	10	12	120					
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota											
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/ layanan pengaduan yang ditindaklanjuti	68	88	10	12	120					
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)	95.53	80.93			75.00					
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Prosentase sampah perkotaan yang ditangani (%)										
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelayanan sampah perkotaan (bulan)	60	48	12	12	100					
						Jumlah dokumen Laporan Periodik Bulanan Sampah Terhadap Volume Sampah harian	5	2	1	1	100					
						Jumlah TPA yang dikelola (unit)	4	2	2	2	100					

2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dal Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya sosialisasi regulasi dan kebijakan lokal	5	1	-	-	-			
						Jumlah keompok masyarakat dalam pengelolaan persampahan	6	4	2	3	150			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2026 (Akhir Periode)	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2022			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2023	
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
					Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (%)	100							
						Prosentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100							
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100							
						Presentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100							
1	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)								
x	xx	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	8	-	-	-	-	2	2	100.00
x	xx	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	8	-	-	-	-	2	2	100.00
x	xx	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (dokumen)	15	-	-	-	-	6	6	100.00
x	xx	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	16	-	-	-	-	4	4	100.00
x	xx	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan (%)		-	-	-	-			
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	14	-	-	-	-	14	14	100.00

x	xx	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	36	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (dokumen)	12	-	-	-	-	12	12	100.00
x	xx	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/semesteran SKPD (laporan)	8	-	-	-	-	2	2	100.00
x	xx	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penata-usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		-	-	-	-			
x	xx	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	20	-	-	-	-	2	2	100.00
x	xx	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	18	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)								
x	xx	01	2.05	03	Pendataan dan Pengo-jaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dok)	37	-	-	-	-	1	1	100.00
x	xx	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	6	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (org)	-	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)								
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	29	-	-	-	-	20	20	100.00
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	-	-	-	-	2	2	100.00

x	xx	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	-	-	-	-	2	2	100.00
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	48	-	-	-	-	12	12	100.00
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	48	-	-	-	-	12	12	100.00
x	xx	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	4	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)								
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Disediakan (Unit)	2	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan (Unit)	26	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)	21	-	-	-	-	7	7	100.00
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	5	-	-	-	-	10	10	100.00
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	35	-	-	-	-	1	1	100.00
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)								
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	48	-	-	-	-	12	12	100.00
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	48	-	-	-	-	12	12	100.00

x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	48	-	-	-	-	12	12	100.00
xx	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)								
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	27	-	-	-	-	27	27	100.00
x	xx	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara(unit)	15	-	-	-	-	15	15	100.00
x	xx	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	6	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)	1	-	-	-	-	-	-	0.00
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	-	-	-	-	1	1	100.00
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharana/ direhabilitasi(unit)	8	-	-	-	-	5	5	100.00
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi (unit)	18	-	-	-	-	5	5	100.00
	11				URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
x	xx	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase IKPLHD, KLHS RPJMD(%)								
x	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase IKPLHD, KLHS RPJMD(%)								
x	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yag disusun (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
x	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS (dokumen)	1	-	-	-	-			
x	11	02	2.02	02	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota (dokumen)	1	-	-	-	-	-	-	0.00
x	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	-	-	-	-			
						Cakupan Daerah Yang dikonservasi (%)	100	-	-	-	-			
x	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan(dokumen)	12	-	-	-	-			

11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
11	03	2.01	02	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)	12	-	-	-	-			
11	03	2.02	03	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (titik)	jumlah sumber pencemar dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (Titik)	12	-	-	-	-	3	3	100.00
11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Luas daerah ynnng dikonservasi/direhabilitasi (Ha)	60	-	-	-	-			
11	03	2.03	04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	31.9	-	-	-	-			
11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau(Ha)		-	-	-	-			
11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)	8	-	-	-	-	2	2	100.00
11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota(Hektar)	5.62	-	-	-	-	0.5	0.5	100.00
11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	100	-	-	-	-			
11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan)	4	-	-	-	-			
11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 (Laporan)	4	-	-	-	-	1	1	100.00

11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen ijin Lingkungan dan Presentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	71.48	-	-	-	-			
11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen)		-	-	-	-			
11	06	2.01	01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan (dokumen)	200	-	-	-	-	50	50	100.00
11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/ Kota (Laporan)	200	-	-	-	-	50	50	100.00
11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (Dokumen)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau istitusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	4	-	-	-	-			
11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/ instansi/ kelompok masyarakat yang mendapat edukasi tentang lingkungan hidup (lembaga)	4	-	-	-	-			
11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	4	-	-	-	-	1	1	100.00
11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	-	-	-	-			

	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap lingkungan(dokumen)</i>	8	-	-	-	-			
	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)</i>	4	-	-	-	-	1	1	100.00
	11	10	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	<i>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Dokumen)</i>	4	-	-	-	-	-	-	0.00
	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	<i>Persentase penanganan sampah (%)</i>	100	-	-	-	-			
						<i>Persentase Pengurangan sampah (%)</i>	0.3	-	-	-	-			
	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	<i>Jumlah penanganan sampah (Ton)</i>		-	-	-	-			
	11	11	2.01	02	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	<i>Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)</i>	4	-	-	-	-	1	1	100.00
	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton)</i>	31,163.12	-	-	-	-	8,078.44	8,078.44	100.00
	11	11	2.01	04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	<i>Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)</i>	12	-	-	-	-	3	3	100.00
	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	<i>Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir (unit)</i>	4	-	-	-	-	2	2	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capain		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	-	√	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	Tahun 2022 telah tersusunnya dokumen RPPLH berupa Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLH)
2	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2023 direncanakan untuk Penyusunan KLHS RPMJP
3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	√	90.91%	32.77%	45.67%	71.48%	42%	14%	45.67%	71.48%	Pada Tahun 2023 usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengurusan izin lingkungan baru 7 usaha daritarget 50 atau mencapai 14%
4	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
5	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
6	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
7	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
8	Penetapan hak MHA	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini

RENJA DLH [2024}

9	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan danketerampilan	-	√	7	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untukkegiatan ini
10	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	√	6	-	-	-	1	-	-	-	Tahun 2022 pengadaan sarana prasarana persampahan berupa mobil sampah
11	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	√	7	7	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan ini
12	Timbulan sampah yang ditangani	-	√	95.53%	99%	99%	99%	75.52%	86.61%	99%	99%	Sampai pada bulan Juni 2023 sampah yang tertimbun berjumlah : 26.991 m3 dan yang terangkut berejumlah 23.375 m3
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-	√	45%	0.27	0.27	0.27	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 tidak dianggarkan untuk kegiatan di Pusat Daur Ulang sampah
14	Persentase cakupan area pelayanan	-	√	5.34	-	-	-	-	8.40%	-	-	Cakupan Areal pelayanan sampah untuk Kab. Flores Timur baru di 21 Kelurahan/desa dimana jumlah kel./desa yang ada sebanyak 250 jadi baru 8,40%
15	Persentase jumlah sampahyang tertangani	-	√	95.53%	99%	99%	99%	75.52%	86.61%	99%	99%	Tahun 2023 Persentase sampah yang baru tertanganimencaipai 86,61 persen.
16	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	√	100%	-	-	-	-	-	-	-	Tahun 2022 sampai dengan 2024 untuk pengelolaan sampah dengan pihak swastabelum dilaksanakan
17	Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH) Kabupaten	-	√	-	69.71	69.81	69.911	67.35	-	69.81	69.911	Tahun 2022 IKLH sudah dapat dihitung sedangkan tahun 2023 belum bisa dihitung karena pelaksanaannya bulan desember

Dari tabel 2.2. di atas, dapat dilihat bahwa target dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan bidang urusan sebagai berikut :

- Indikator Kinerja tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota realisasi capaian setiap tahunnya 100% dengan hasil yang dicapai berupa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).
- Indikator Kinerja Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dimana capaian pada Tahun 2022 usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengurusan izin lingkungan sebanyak 21 usaha dari target 50 atau hanya 42%. Dilihat dari prosentase rendah bukan karena usaha dan atau kegiatan yang mengurus izin lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur rendah, tetapi untuk pengurusan ijin kelayakan lingkungan sudah menggunakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (OSS) sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Indikator Kinerja Timbulan Sampah Yang Ditangani dan Presentase jumlah sampah yang tertangani untuk Tahun 2022 yaitu timbulan sampah 60.712 m³ dan sampah yang tertangani 45.848 m³ atau sebesar 75,52%. Penanganan sampah baru 21 Desa/kelurahan dari 250 desa/kelurahan di Kabupaten Flores Timur.
- Indikator Kinerja penetapan hak MHA yang mendukung pelayanan kinerja pada tingkat realisasi capaian tidak dapat dijalankan pada urusan lingkungan hidup karena anggaran belum ada.
- Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2022 sebesar 67,35% (Sedang).

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Salah satu tugas pokok dinas lingkungan hidup yaitu menjalankan urusan bidang lingkungan hidup dalam hal pengelolaan persampahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam penerapan pengelolaan sistem persampahan dilakukan dengan pengurangan sampah (melalui Pusat daur Ulang) dan penanganan sampah (pengangkutan sampah dari TPS ke TPA). Berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui konservasi

terhadap mata air dan rehabilitasi lahan kritis untuk mencapai kualitas lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan tingkat realisasi urusan Dinas Lingkungan Hidup sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh petugas kebersihan terkait dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan juga pada pengurangan sampah melalui pusat daur ulang belum berfungsi secara baik. Pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan.

Adapun beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah yang berkaitan dengan urusan persampahan dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup :

1. Belum terwujudnya fungsi laboratorium lingkungan hidup
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah
3. Masih rendahnya daerah yang dikonservasi/direhabilitasi
4. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau public dan privat
5. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
6. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait Lingkungan Hidup
7. Masih rendahnya ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah maka analisis kebutuhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP				6,563,650,290					5,851,593,718
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5,489,800,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota				2,140,993,718
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100	
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100	
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100				Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(%)	100				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan(%)	100	
Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	-	45,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran danevaluasi (dok)	-	55,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15,000,000
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKASKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(dok)	20	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD(dok)	2	10,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3	15,000,000
Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah (Laporan)	4	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah (Laporan)	4	15,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan (Dok)	-	1,863,340,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan (Dok)	-	1,730,493,718
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Org/ bulan)	27/14	1,843,340,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	27/14	1,648,893,718
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	15,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (dokumen)	12	71,600,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	10,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(dok)	-	20,630,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(dok)	-	17,000,000
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	1	5,000,000	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dok)	1	5,000,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	5,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	6	5,000,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(dok)	6	10,630,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(dok)	6	7,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	30,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	-	20,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12	10,000,000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	12	5,000,000
Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	10,000,000	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	5,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka (OPD)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka - Kupang - Jakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	1	10,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	-	274,100,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	-	127,500,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3	20,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	10,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	5,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	5,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan (paket)	1	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disiapkan (paket)	1	15,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	30,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Larantuka (OPD)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok)	1	1,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok)	1	1,500,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	12	35,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	135,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	50,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	18,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	10,000,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	12	4,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Larantuka (OPD)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (dokumen)	12	1,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	-	2,633,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	-	116,000,000
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	60,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	60,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	2,568,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka (OPD)	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	54,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	-	623,730,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	-	75,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (sunit)	27	600,330,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Larantuka (OPD)	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	33	30,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	8,400,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	10,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	10,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	1	15,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	3	5,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Larantuka (OPD)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)	3	20,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1,073,850,290	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				3,710,600,000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	25,000,000	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)		25,000,000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			-	25,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)		25,000,000
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Larantuka (OPD)	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yang disusun (Dokumen)	1	25,000,000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Larantuka (OPD)	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten atau kota yang disusun (Dokumen)	1	25,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	450,500,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)		402,500,000
		Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50				Cakupan daerah yang dikonservasi (%)		
Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota			-	230,500,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota				182,500,000

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udaradan Laut		Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udaradan laut	1	20,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udaradan Laut	Larantuka-Kupang	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udaradan laut(dokumen)	1	20,000,000
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1	12,500,000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Larantuka	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)	1	12,500,000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)	1	198,000,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Larantuka	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)	1	150,000,000
Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota			-	20,000,000	Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota				20,000,000
Penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup		jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)	3	20,000,000	Penghentian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Kec. Adonara Timur, Kec. Larantuka, Kec. Tanjung Bunga	jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan (titik)	3	20,000,000
Pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota			-	200,000,000	Pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota				200,000,000
Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1	200,000,000	Pelaksanaan Restorasi	Desa Tenawahang, Kecamatan Titehena	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1	200,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	15.82	173,350,290	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)		100,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			-	173,350,290	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100,000,000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (ha)	4.62	100,000,000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec. Adonara Timur Kelurahan Waiwerang, Kec.Larantuka	Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (ha)	4.06	75,000,000
Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati diluar kawasan Hutan		Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota(ha)	2	73,350,290	Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati diluar kawasan Hutan	Kec. Witihamia Desa Pledo (Dusun Meko)	Luas Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota(ha)	1	25,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3(%)	50.66	20,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3(%)		25,000,000
Penyimpanan sementara Limbah B3			-	20,000,000	Penyimpanan sementara Limbah B3				25,000,000
Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 (laporan)	1	20,000,000	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	19 Kecamatan	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 (laporan)	1	25,000,000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	45.67	75,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)		62,500,000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-	75,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				62,500,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Jumlah usaha (dokumen)	50	25,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	19 Kec	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Dokumen)	25	25,000,000
Pengawasan Usaha dan /atau Kegiatan yang IzinLingkungan Hidup, IzinPPLH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(laporan)	50	25,000,000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau PersetujuanPemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19 Kec	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	25	37,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah dokumen hasil koordinasidan sinkronisasi pengawasan danpenerapan sanksi upaya dan rencana PPLHD (dokumen)	1	25,000,000	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DANPENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		<i>Jumlah lembaga atau kelompokmasyarakat atau institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)</i>	1	50,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		<i>Jumlah lembaga atau kelompokmasyarakat atau institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)</i>		50,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan,Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	50,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50,000,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA(Rp,-)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ Institusi Yang Terdaftar Yang Meningkatkan Kapasitas dan Komptensinya Terkait PPLH(Lembaga)	1	50,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Adonara Timur	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat/ Institusi Yang Terdaftar Yang Meningkatkan Kapasitas dan Komptensinya Terkait PPLH(Lembaga)	1	50,000,000
PROGRAM PENANANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		<i>Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)</i>	100	50,000,000	PROGRAM PENANANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		<i>Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)</i>		20,000,000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			-	50,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				20,000,000
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)	1	25,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19 Kec	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani (Dokumen)	1	10,000,000
Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (dokumen)	1	25,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi penyelesaian dokumen sengketa dan/ atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan	19 Kec	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa terhadap dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan (dokumen)	1	10,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		<i>Persentase penanganan sampah (%)</i>	99	230,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		<i>Persentase penanganan sampah (%)</i>		3,025,600,000
		<i>Persentase Pengurangan sampah (%)</i>	0.28				<i>Persentase Pengurangan sampah (%)</i>	0.28	
Pengelolaan sampah			-	230,000,000	Pengelolaan sampah				3,025,600,000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp,-)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan		Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	3	30,000,000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	kec.Larantuka, dan Kec. Adonara Timur	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	3	50,000,000
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali		Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali (laporan)	11	50,000,000	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Kec. Larantuka Desa Lamawalang	Jumlah sampah yang terdaur ulang (ton)	1	50,000,000
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kab/kota (ton/kota)	15,772.187	150,000,000	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Larantuka	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (ton)	15,772.187	2,925,600,000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan system perencana bahwa atas (buttom up planning) berdasarkan asa dekoktatisasi dan desentralisasi, baik bagi kelompok masyarakat maupun perangkat daerah kabupaten atau kota maupun penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan pada perangkat daerah

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuain usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal Bulan Maret 2023 dengan 19 kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkan dengan forum konsultasi public tahun 2023.

Rekapitulasi musrenbang kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	-	
			Cakupan daerah yang dikonservasi (%)		
	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan hidup kab/ kota		Luas daerah yang dikonservasi/ direhabilitasi (Ha)	-	
	Sub kegiatan : Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Penghijauan di daerah mata air Wai Ken"ing, Daerah Mata Air Wai Bia dan Daerah mata air Bukit Kuma, Kolipetung, Kec. Adonara	Penghijauan pada Daerah Sumber Mata Air	3 Lokasi	Terima dan dilakukan survey lokasi mata air karena mata air belum masuk dalam data di DLH
		Desa Lamahoda, Kec. Adonara		2 Lokasi	Terima dan dilakukan survey pada 4 mata air
		Desa Hinga, Kec. Kelubagolit		1 Lokasi	Diterima, melakukan survey lokasi di 2 mata air
		Desa Kolilanang, Lambunga, Kec. Kelubagolit		1 Lokasi	Diterima, perlu ada penghijauan karena mata air yang ada di lokasi ini di manfaatkan oleh desa lambunga
		Desa Mangaaleng Kecamatan Kelubagolit		3 Lokasi	Diterima
		Mata Air Wai Ana - Desa Lambunga - Kec. Kelubagolit, Sukutoka, Kec. Kelubagolit		-	Diterima, perlu ada penghijauan karena mata air yang ada di lokasi ini di manfaatkan oleh desa suku token
		Mata Air ikan Burak Desa Oyangbarang. Kec. Wotan Ulumando		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan penghijauan di kec. Wotan ulumado
		Desa Pandai, Kec. Wotan Ulumando		100 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan penghijauan di kec. Wotan ulumado
		Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 ada kegiatan penghijauan di kec. Wotan ulumado

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Mata Air Wai Kim Beto, Wai Jawa Dan Wai Noret, Hoko Horowura, Kec. Adonara Tengah		3 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah		2 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		Desa Lewobele (Dusun 1 s/d 4), Kec. Adonara Tengah		4 Kelompok	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		Desa Lewobele (Dusun 1 s/d 4), Kec. Adonara Tengah		6 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		(Dusun I Rt.001 RW.001) Desa Lewopao, Kec. Adonara Tengah		4 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		(Mata Air Waibelolong, Mata Air Waibihu, Mata Air Wainebo, Nubalema Dua, Kec. Adonara Tengah		3 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		Desa Oesayang, Kec. Adonara Tengah		2 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		(Wai Putih, Wai Toba, Wai Bawa, Wai Jari & Wai Nebo, Desa Wewit, Kec. Adonara Tengah		5 Lokasi	Tahun 2022 telah dilakukan penghijauan di kec. Adonara tengah
		(RT.009/RW.005 Dusun 3 Namatukam - Desa Boleng, Kec. Ile Boleng		2 Lokasi	Ditolak, karena tidak ada daerah mata air
		Desa Balaweling, Kec. Witihamu		3 Lokasi	Dilakukan survey lokasi karena mata air belum ada dalam data di dinas
		Sumber Mata Air Wai Lawe Desa Puhu Kecamatan Adonara Timur, Tuagoetobi, Kec. Witihamu		Lokasi	Ditolak karena mata air wai lawe berada di desa puhu kecamatan ado. Timur
		Penanaman Reboisasi Mata Air Pegunungan Untuk Kebutuhan Desa Mata Air Noret, Bandonu, Kec. Tanjung Bunga		1 Lokasi	melakukan Survey lokasi mata air
		(Desa Lamanabi, Lamanabi, Kec. Tanjung Bunga)		2 Lokasi	Mata air yang ada di lamanabi yaitu wai norek berada di desa latonliwo
		(Kawasan Hutan atau lereng di sekitar Jalur banjir (Wilayah Bronjong Kelurahan Balela Kec. Lantuka)		1 Lokasi	Diterima untuk penghijauan
		(RT 015 Penghijauan Bukit Postoh (Bambunisasi, lamtoro), Postoh, Kec. Lantuka)		1 Lokasi	Diterima untuk penghijauan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		(1000 anakan bambu, berlokasi di Lebao III, Pukentobi Wangin Bao, Kec. Lantuka)		1 Lokasi	Diterima untuk penghijauan
		(Desa Kalike, Kelike, Kec. Solor Selatan)		30 Lokasi	dilakukan survey lokasi untuk 4 mata air
		(Desa Lemanu, Mata Air, Lemanu, Kec. Solor Selatan)		1 Lokasi	dilakukan survey lokasi untuk 2 mata air
		(Dusun I dan Dusun II, Desa Sulengwaseng, Kecamatan Solor Selatan, Sulengwaseng, Kec. Solor Selatan)		2 Lokasi	dilakukan survey lokasi untuk 2 mata air
		(Sumber Mata Air Baladudak, Sumber Mata Air Letomatan, Sumber Mata Air Wulowakon, Bama, Kec. Demon Pagong)		3 Lokasi	Penghijauan telah dilaksanakan tahun 2022 di kec. Demon pagong
		(Desa Blepanawa, Blepanawa, Kec. Demon Pagong)		5 Lokasi	Penghijauan telah dilaksanakan tahun 2022 di kec. Demon pagong
		(Mata Air Watonitung, Kawalelo, Kec. Demon Pagong)		1 Lokasi	Penghijauan telah dilaksanakan tahun 2022 di kec. Demon pagong
		(Dan Belen, Mata Air Wai Uran dan Wai Onge Desa Lewokluok, Lewomuda, Kec. Demon Pagong)		3 Lokasi	Penghijauan telah dilaksanakan tahun 2022 di kec. Demon pagong
		(Desa Kawuta, Kawuta, Kec. Solor Timur)		3 Lokasi	melakukan survey lokasi, mata air di desa ini belum ada data di DLH
		(Mata Air Wai Lelu Desa Lewogeka, seluas satu hektar, Lewogeka, Kec. Solor Timur)		1 Lokasi	Dilakukan survey lokasi
		(Mata Air Wai Lelu Desa Lewogeka, seluas satu hektar, Lewogeka, Kec. Solor Timur)		1 Lokasi	Dilakukan survey lokasi
		(Tanah Werang, Kec. Solor Timur)		2 Lokasi	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Lantuka
		(Daerah mata air, Karawatung, Kec. Solor Barat)		50 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 telah dilakukan penghijauan di kecamatan ini
		(Dusun D Desa Tenawahang, Tenawahang, Kec. Titehena)		1 Paket	
		(Waiwadang Desa Tenawahang Dan Sigagoker Desa Leraboleng Kecamatan Titehena)		2 Lokasi	melakukan survey lokasi

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		(Untuk meningkatkan daya serap terhadap air hujan maka dibutuhkan penghijauan di 5 sumber mata air di desa Leraboleng yakni Wai Riki, Penula, Sigakoker, Matang Pito dan Norek., Leraboleng, Kec. Titehena)		5 Lokasi	melakukan survey lokasi
		(Perlu adanya Program Penghijauan di Mata Air Waiburak untuk menjaga stabilitas Debit air bagi Kebutuhan Masyarakat di Desa Konga, Volume 1 Paket, Konga, Kec. Titehena)		Lokasi	melakukan survey lokasi
		(Sumber mata Air di Dusun Waidang, Bokang Wolomatang, Kec. Titehena)		1 Lokasi	melakukan survey lokasi
		(Hutan di sekitar lereng gunung Lewotobi (Goliwato), Hokeng Jaya, Kec. Wulanggitang)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 dilakukan penghijauan
		(Hutan di sekitar lereng gunung Lewotobi (Goliwato), Hokeng Jaya, Kec. Wulanggitang)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 dilakukan penghijauan
		(Waipuhe, Nawokote, Kec. Wulanggitang)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 dilakukan penghijauan
		(Mata Air Padulaka, Desa Pululera, Pululera, Kec. Wulanggitang)		1 Lokasi	Tahun 2022 dan 2023 dilakukan penghijauan
		(NIMUN DANIBAO, Nimun Danibao, Kec. Adonara Barat)		5 Lokasi	Survey lokasi mata air
		(Dusun I,II,III Desa Tonuwotan, Tonuwotan, Kec. Adonara Barat)		3 Lokasi	Survey lokasi mata air
		(WAITANGE DAN WAITANGGE, Riangpadu, Kec. Adonara Barat)		2 Lokasi	Survey lokasi mata air
		(Bukit Seburu II, Kec. Adonara Barat)		4 Lokasi	Survey lokasi mata air
		(Wairita, Wolo Klibang, Liwo Ele (Ubek), Kimakamak, Kec. Adonara Barat)		3 Lokasi	Survey lokasi mata air
		(Mata Air Wai Raong dan Mata Air Ado Pehan Desa Watobaya, Watobaya, Kec. Adonara Barat)		2 Lokasi	Survey lokasi mata air
		(Desa Dawataa, Mata air Wai Doko, Kurang Kenireng, Witi Koba., Dawataa, Kec. Adonara Timur)		3 Lokasi	survey ke 3 lokasi mata air

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		(DESA DEMONDEI - DESA PANDAI, Teromh, Kec. Adonara Timur)		1 Lokasi	mata air yang di gunakan oleh desa terong berasal dari mata air wilayah wotan ulumado
		(Desa Demondei, Kecamatan Wotan Ulumado, Desa Beloto dan Desa Dawataa,		3 Lokasi	mata air yang di gunakan oleh desa bilal berasal dari mata air desa lain
		(Desa Tapobali, Tapobali, Kec. Adonara Timur)		3 Lokasi	melakukan survey ke 4 lokasi mata air
		(Desa Puhu - Kecamatan Adonara Timur, Puhu, Kec. Adonara Timur)		8 Lokasi	melakukan Survey lokasi mata air
		(Desa Kwaelaga Lamawato (Wilayah Tapobali), Kwaelaga Lamawato, Kec.		2 Lokasi	melakukan Survey lokasi mata air
		(Wai Lako, Wai Noret dan Wai Doko, Lelen Bala, Kec. Adonara Timur)		3 Lokasi	melakukan Survey lokasi mata air
		(wai lingo dan wai wua desa saosina, Saosina, Kec. Adonara Timur)		2 Lokasi	melakukan Survey lokasi mata air
2	Program pengelolaan persampahan		Persentase penanganan sampah (%)		
			Persentase pengurangan sampah (%)		
	Kegiatan : Pengelolaan sampah		Jumlah penanganan sampah (Ton)		
	Sub Kegiatan : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kelurahan Sarotari tengah , Kab. Flores Timur	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Kelompok)	-	Usulan diterima untuk penambahan kelompok gempar
		Kelurahan Ekasapta, Kab. Flores Timur		-	Usulan diterima untuk lanjutan dari kegiatan Gempar
		Desa Oesayang, Kec-Adonara Tengah,Kab-Flores Timur		-	Usulan diterima untuk penambahan kelompok gempar
	Sub kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota		Jumlah penanganan sampah (Ton)		
		(RT. 001, RT. 002, RT. 003, RT. 004, RT. 005, dan RT. 006, Nelelamawangi Dua, Kec. Ile Boleng)	Peningkatan, Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sampah	6 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka
		(Desa Balaweling, Balaweling, Kec. Witihamu)		3 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		(pembangunan tempat pembuangan sampa untuk masyarakat desa Latonliwo II sebanyak 5 unit yang terdiri dari 2 (dua) unit berada di dusun I, 1 (satu) unit berada di dusun II, dan 2 (dua) unit berada di dusun III, Latonliwo Dua, Kec. Tanjung Bunga)		1 Kelompok	Ditolak karena pembangunan TPS pada desa yang belum memiliki tempat pembuangan akhir akan mendatangkan masalah baru pada TPS
		(Kelurahan Amagarapati, Amagarapati, Kec. Lantuka)		1 Kelompok	Tahun 2023 kegiatan ini dilaksanakan
		(Kelurahan Balela, Kec. Lantuka)		9 Kelompok	Diterima untuk penghijauan daerah gunung
		(RW. 01 s/d RW.10, Ekasapta, Kec. Lantuka)		10 Kelompok	Dilaksanakan dari tahun 2021 s/d sekarang
		(RT 02, RT 08, RT 013, Waibalun, Kec. Lantuka)		3 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(Kelurahan Lewolere, Lewolere, Kec. Lantuka)		4 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(Kelurahan Pohon Bao, Pohon Bao, Kec. Lantuka)		1 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(Kelurahan Pohon Bao, Pohon Bao, Kec. Lantuka)		1 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(Kelurahan Lebao, Pukentobi Wangin Bao, Kec. Lantuka)		4 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(Kelurahan Lebao, Pukentobi Wangin Bao, Kec. Lantuka)		4 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(RT 002 RW 002 dan RT 013 RW 005 Kelurahan Sarotari Tengah, Sarotari Tengah, Kec. Lantuka)		2 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(RT.001 - RT.010 Kelurahan Sarotari Timur, Kec. Lantuka)		2 Kelompok	Tolak masih fokus pada 3 kelurahan
		(Dusun 1, 2 dan 3, Kawuta, Kec. Solor Timur)		7 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Lantuka
		(Untuk 3 kelompok yang ada di Dusun 1, 2 dan 3, Menanga, Kec. Solor Timur)		3 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Lantuka
		(Tanah Werang, Kec. Solor Timur)		10 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Lantuka

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		(Kalelu, Kec. Solor Barat)		3 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka
		(Kelurahan Ritaebang, Solor Barat)		2 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka
		(Desa Tenawahang, Kec. Titehena)		20 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka
		(Pembuatan Bak Sampah Permanen Desa Boru, Boru, Kec. Wulanggitang)		2 Kelompok	Ditolak karena pembangunan TPS pada desa yang belum memiliki tempat pembuangan akhir akan mendatangkan masalah baru pada TPS
		(Desa Pululera, Pululera, Kec. Wulanggitang)		6 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka
		(Wolokibang, Kec. Adonara Barat)		4 Kelompok	Ditolak karena pengelolaan persampahan masih fokus pada 2 daerah perkotaan yaitu kec. Adonara timur dan kec. Larantuka
		(Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) DiDesa Lamalota, Adonara Timur)		1 Kelompok	Lokasi yang disiapkan oleh masyarakat desa ketika dihubungkan dengan RTRW tidak sesuai
		(Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kecamatan Adonara Timur, Waiwerang Kota, Kec. Adonara Timur)		1 Kelompok	Lokasi yang disiapkan oleh masyarakat desa ketika dihubungkan dengan RTRW tidak sesuai

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional, serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung 5 (lima) arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan Nasional Tahun 2024, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2024 yaitu ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 tersebut, maka pembangunan Nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan. Salah satu prioritas nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yakni PN 6: *Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim*. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 yakni: ***“Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas”***, dengan fokus pada 4 (empat) Prioritas pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini menggambarkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan daerah berdasarkan Renstra Perangkat daerah tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dikaitkan dengan sasaran kinerja Renstra perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran
			2023	2024
Terwujudnya kualitas Lingkungan hidup yang baik	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	69,71	69,81

Untuk mencapai sasaran dari masing-masing prioritas pembangunan tersebut, dilaksanakan melalui program-program prioritas dengan indikator dan target kinerja sebagaimana terlihat pada Tabel berikut;

PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	3.6 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75
	3.7 Meningkatnya system pengolahan lahan yang ramah lingkungan	Persentase penanganan sampah	99
		Persentase pengurangan sampah	0,28

3.3. Program dan Kegiatan

Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Program dan Kegiatan yang akan direncanakan pada Tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2024 mempunyai 2 (dua) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran. Program prioritas tersebut terdiri dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Sampah

Rumusan rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dan
Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11				DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (Program Prioritas)				3,428,100,000				749,500,000
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)		75	402,500,000			75	484,500,000
						Cakupan daerah yang dikonservasi (%)		50				75	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)			182,500,000				244,500,000
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut(dokumen)	Larantuka- Kupang, Kab. Flores Timur	1	20,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		1	30,000,000
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)	Larantuka, Kab. Flores Timur	1	12,500,000	Dana Transfer Umum - DAU		1	15,000,000
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan (dokumen)	Larantuka, Kab. Flores Timur	1	150,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		1	199,500,000
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan(Titik)			20,000,000				40,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	03	2.02	0003	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<i>jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan(titik)</i>	Kec. Adonara Timur, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Larantuka	3	20,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		3	40,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	<i>Luas daerah ynnng dikonservasi/direhabilitasi (Ha)</i>			200,000,000				200,000,000
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	<i>Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)</i>	Desa Tenawahang, Kec. Titehena	1	200,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		1	200,000,000
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	<i>Persentase penanganan sampah (%)</i>		99	3,025,600,000			99	265,000,000
						<i>Persentase Pengurangan sampah (%)</i>		0.28					
2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	<i>Jumlah penanganan sampah (Ton)</i>			3,025,600,000				265,000,000
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	<i>Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)</i>	Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur	3	50,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		3	45,000,000
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	<i>Jumlah sampah yang terdaur ulang (ton)</i>	Kec. Larantuka (ds. Lamawalang)	1.00	50,000,000	Dana Transfer Umum - DAU		1.00	55,000,000
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	<i>Jumlah sampah yang tertagani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (ton)</i>	Kec. Larantuka, Kec. Adonara Timur	15772.18	2,925,600,000	Dana Transfer Umum - DAU		23469.37	165,000,000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			5,851,593,718						6,762,845,930
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			5,851,593,718						6,762,845,930
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			2,140,993,718						5,383,345,930
						Pesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	2,140,993,718				PP	100	5,383,345,930
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						100	
						Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)	100						100	
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	55,000,000					100	50,000,000
2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	2	15,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	20,000,000
2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)	2	10,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	10,000,000
2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)	3	15,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	6	10,000,000
2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	15,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	4	10,000,000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan (%)		1,730,493,718						2,076,600,000
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	27/14	1,648,893,718	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	27/14	2,056,600,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	12	71,600,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	15,000,000
2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)	2	10,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	5,000,000
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)		17,000,000						17,000,000
2	11	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dokumen)	1	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	5,000,000
2	11	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	6	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	5,000,000
2	11	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD (laporan)	6	7,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	6	7,000,000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		20,000,000						25,000,000
2	11	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (dokumen)	12	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	10,000,000
2	11	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	12	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	5,000,000
2	11	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)	1	10,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	10,000,000
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		127,500,000					100	212,100,000
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	3	20,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	3	15,000,000
2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	10,000,000
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	3,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	15,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	15,000,000
x	xx	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	5,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	25,000,000
x	xx	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok)	1	1,500,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	1,500,000
x	xx	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	30,000,000
x	xx	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	12	50,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	100,000,000
x	xx	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dokumen)	1	10,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	8,000,000
	xx	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (dokumen)	1	1,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	4,600,000
x	xx	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)	100	116,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	100	2,633,245,930
x	xx	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	12	2,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	4,000,000
x	xx	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)	12	60,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	60,000,000
x	xx	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	12	54,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	12	2,569,245,930
x	xx	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)	100	75,000,000				PP	100	369,400,000
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)	27	30,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	27	350,000,000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)	1	10,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	9,400,000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi(unit)	1	15,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	5,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
x	xx	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	JumlahSarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	3	20,000,000	Larantuka, Kab. Flores Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	3	5,000,000	
2	11				Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			3,710,600,000						1,379,500,000	
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase IKPLHD, KLHS, RPJMD (%)	100	25,000,000		Dana Transfer Umum - DAU		PP	100	30,000,000	
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dokumen)		25,000,000				PP		30,000,000	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota (dokumen)	1	25,000,000	Larantuka (OPD)	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	30,000,000	
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	402,500,000		Dana Transfer Umum - DAU		Infras- truktur & LH		534,500,000	
						Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	50								
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan (Dokumen)		182,500,000						244,500,000	
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut(dokumen)	1	20,000,000	Larantuka - Kupang (Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- truktur & LH	1	30,000,000	
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan (dokumen)	1	12,500,000	Larantuka (Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- truktur & LH	1	15,000,000	
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (dokumen)	1	150,000,000	Larantuka (Kab. Flores Timur)	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- truktur & LH	1	199,500,000	
2	11	03	2.02		Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Jumlah Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan(Titik)		20,000,000				Infras- truktur & LH	3	40,000,000	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	03	2.02	0003	Penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	jumlah sumber pencemar dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan(titik)	3	20,000,000	Kec. Adonara Timur, Kec. Tanjung Bunga, Kec. Lantuka	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur & LH	3	40,000,000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab./kota	Luas daerah ynnng dikonservasi/direhabilitasi (Ha)		200,000,000				Infras- struktur & LH		250,000,000
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	Luas area yang dilakukan restorasi di Kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (ha)	1	200,000,000	Desa Tenawahang - Kec. Titehena	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur & LH	1	250,000,000
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman Hayati (%)	15.82	100,000,000				PP		265,000,000
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Luas Ruang Terbuka Hijau(Ha)		100,000,000						265,000,000
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang seharusnya dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)	4.62	75,000,000	Kec. Lantuka, Kec. Adonara Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	4.62	150,000,000
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman keanekaragaman Hayati di luar kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota (unit)	2	25,000,000	Kec. Witihama (ds. Pledo-dusun meko)	Dana Transfer Umum - DAU		PP	2	115,000,000
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase ketaatan fasilitas kesehatan, usaha/kegiatan terhadap pengelolaan limbah B3 (%)	50.66	25,000,000				Infras- struktur & LH		30,000,000
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Ketaatan, Usaha Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah B3(laporan)		25,000,000				Infras- struktur & LH		30,000,000
2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/ izin penyimpanan sementara dan pengukuran limbah B3 yang diverifikasi (laporan)	1	25,000,000	19 kecamatan	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur & LH	1	30,000,000
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL yang memiliki dokumen persetujuan Lingkungan dan prosentase koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sanksi upaya PPLH (%)	45.67	62,500,000				PP		60,000,000

KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL(dokumen)	100	62,500,000				PP	100	60,000,000
2	11	06	2.01	0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan lingkungan, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup dan surat kelayakan operasi (Dokumen)	50	25,000,000	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - DAU		PP	50	30,000,000
2	11	06	2.01	03		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (badan usaha)	50	37,500,000	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - DAU		PP	50	70,000,000
2	11	08				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah lembaga atau kelompok masyarakat atau isitüsü yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	1	50,000,000				PP		75,000,000
2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga atau Instansi/Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Edukasi tentang Lingkungan Hidup(Lembaga)	1	50,000,000					1	75,000,000
2	11	08	2.01	01		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga pendidikan formal/komunitas/ kelompok masyarakatan	Jumlah pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (lembaga)	1	50,000,000	Kec. Adonara Timur	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	75,000,000
2	11	10				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH dan dokumen penyelesaian sengketa (%)	100	20,000,000				PP		80,000,000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	N	D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa Terhadap Lingkungan Hidup (Dokumen)		20,000,000				PP		80,000,000
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ditangani (pengaduan)	1	10,000,000	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	40,000,000
2	11	10	2.01	0006	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	10,000,000	19 Kecamatan	Dana Transfer Umum - DAU		PP	1	40,000,000
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	3,025,600,000		Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur		265,000,000
						Persentase Pengurangan sampah (%)	0.28							
2	11	11	2.01		Pengelolaan sampah	Jumlah penanganan sampah (Ton)	8,078.44	3,025,600,000						265,000,000
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat (kelompok)	3	50,000,000	Kec. Lantutuka, Kec. Adonara Timur	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur & LH	3	45,000,000
2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (ton)	1	50,000,000	Kecamatan Lantutuka (desa lamawalang)	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur & LH	1	55,000,000
2	11	11	2.01	0020	Penanganan Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPAS Kabupaten/Kota atau TPA/TPAS Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPAS regional (ton)	15,772.18	2,925,600,000	Kec. Lantutuka dan Kec. Adonara Timur (Kel. Waiwerang Kota)	Dana Transfer Umum - DAU		Infras- struktur & LH	23,469.37	165,000,000

BAB V

PENUTUP

RENJA Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2024. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar- ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan program kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pembangunan dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar-program, dalam satu instansi dan antar-instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Upaya pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RENJA Tahun 2024 melalui pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RENJATahun 2024 sebagai berikut:

1. Semua *stakeholders* yang berkepentingan dalam pembangunan daerah yang berwawasan Lingkungan di Kabupaten Flores Timur berkewajiban untuk menjadikan RENJA Tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunannya, terutama yang berkaitan prioritas pembangunan dengan sasaran dan target kinerja yang sudah termuat dalam RENJA;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik baik triwulan, semesteran maupun akhir tahun yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan, dan kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan lainnya;
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan

koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Semua perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, selanjutnya tidak dapat keluar dari kerangka acuan yang telah ditetapkan di dalam RENJA ini, kecuali timbul hal-hal yang mendesak dan prioritas yang tidak sempat termuat dalam RENJA Tahun 2024 ini.

Larantuka, Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur,



SERVULUS SATEL DEMOOR, S.Hut
PEMBINA TK. I
NIP. 197112172000121002